

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah sebuah kelompok regional yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi dan keamanan di wilayah regional Asia Tenggara, dengan berdasarkan pada asas-asas pengambilan keputusan yang bersifat konsensus serta non-interferen (*Council on Foreign Relations*, 2022, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Mencermati tujuan tersebut, berdasarkan pandangan Kishore Mahbubani dan Jeffery Sng (2017), maka ASEAN dianggap telah berhasil mengadakan perdamaian dan kemajuan baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi sejak pendiriannya pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Deklarasi ASEAN di Bangkok (Widodo & Gretiani (ed.), 2017). Robert Yates (2019) juga memperkuat pendapat akan adanya keberhasilan tersebut dengan mengatakan bahwa ASEAN mempunyai peran yang menonjol (*prominent part*) di dalam menegosiasikan dan mengelola tatanan internasional, di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik secara luas, ketika berbagai zaman seperti masa stabilitas, maupun masa-masa transisi dan krisis, terlewati, seperti masa Perang Dingin maupun berbagai peristiwa lainnya (Mahbubani & Sng, 2017).

Pada perkembangan selanjutnya, ASEAN kemudian memutuskan untuk mengikuti tren dunia seperti tren pada saat ini, sejak awal abad ke-21 pada situasi yang lebih kontemporer, yaitu membangun penciptaan komunitas ekonomi bersama yang lebih bebas, melalui penancangan *ASEAN Free Trade Area* di tahun 2003. Walaupun demikian, pada kenyataannya, proses penancangan sebuah program seperti *ASEAN Free Trade Area* tidak berjalan dengan lancar seperti pada proses penancangan yang berada di wilayah regional lain, misalnya Uni Eropa atau kawasan Eropa secara umum (Winarno, 2011). Walaupun ASEAN sempat berada di dalam fase seperti demikian, di tengah tantangan yang ada hingga saat ini,

ASEAN telah memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat serta pemerintah di sepuluh negara anggotanya, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Selanjutnya, Timor Leste (*East Timor*) sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat penuh, mempunyai niat untuk mengajukan keanggotaan tetap dan penuh *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Presiden José Manuel Ramos-Horta mengemukakan bahwa tujuan negara Timor Leste mengajukan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN adalah untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Timor Leste (Sekarwati, 2022), serta memanfaatkan pengaruh regional ASEAN beserta dengan kekuatan komersial di dalam ekonomi regional ASEAN (Ramos-Horta, 2001).

Sejak tahun 2002, yang merupakan tahun kemerdekaan *de jure* bagi Timor Leste, Timor Leste sudah mengajukan keanggotaannya di dalam ASEAN, yang dibuktikan dengan status kemerdekaan Timor Leste telah mendapatkan pengakuan oleh ASEAN (Brago, 2007, Tobing, 2019). Namun, Timor Leste sendiri baru mendaftar untuk keanggotaan ASEAN secara resmi pada tahun 2011. Pasal 6 Ayat 2 Piagam ASEAN, yang merupakan sebuah piagam hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN atau *ASEAN Summit* ke-13 pada tanggal 20 November 2007, dengan pemberlakuan melalui ratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008 (Agensi Pengungsi PBB, Xinhua, 22 November 2007), sendiri mengatur bahwa ada beberapa syarat untuk menjadi anggota tetap dan penuh ASEAN, seperti aspek geografis, aspek pengakuan oleh semua negara anggota ASEAN, dan kesanggupan untuk terikat dengan ASEAN, seperti sepakatnya Timor Leste pada *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC).

Di sisi lain, ada banyak alasan signifikan mengapa Timor Leste begitu penting untuk segera mendapatkan keanggotaan ASEAN-nya. Alasan signifikan tersebut berasal dari ruang lingkup akademis maupun fenomena-fenomena sosial, politik, dan ekonomi terkini.

Alasan yang pertama adalah adanya fakta bahwa Timor Leste, sebenarnya *de facto* sudah menjadi bagian dari struktur, konstruksi dan institusionalisme ASEAN ketika menjadi bagian dari Indonesia, dalam hal ini adalah Provinsi Timor Timur,

dari tanggal 7 Desember 1975 *de jure* menurut Pemerintah Indonesia hingga tahun 1999 *de facto* oleh masyarakat internasional setelah sebuah *referenda* (Rourke, 2019, Lawless, 1976), mengingat bahwa Indonesia telah menjadi anggota ASEAN sejak tahun 1967, serta merupakan negara pendiri ASEAN.

Selanjutnya, alasan yang kedua merupakan alasan yang berhubungan dengan masalah ketidaksempurnaan pada identitas institusional ASEAN, yang kemudian turut pula memunculkan dugaan-dugaan mengenai ketidaksempurnaan pada identitas regional Asia Tenggara (Seixas & Mendes, 2019). Berdasarkan pada landasan instrumental yaitu Pasal 6 Ayat 2 Piagam ASEAN, yang dikaji secara instrumental maupun secara akademis melalui pendekatan epistemologis dan ontologis, di dalam konsep kawasan atau *region* Asia Tenggara yang berhubungan dengan poin pertama dari syarat-syarat keanggotaan ASEAN, ternyata istilah regional Asia Tenggara bukanlah istilah yang *rigid* secara epistemologis dan ontologis.

Menurut catatan sejarah, pengertian regional Asia Tenggara ternyata mengalami perkembangan. Istilah Asia Tenggara pertama kali digunakan pada tahun 1839 oleh seorang pendeta dari Amerika Serikat, Howard Malcolm dalam bukunya *Travels in South-Eastern Asia*, namun Malcolm hanya memasukkan bagian daratan dan mengecualikan bagian maritim dalam definisinya tentang Asia Tenggara (Eliot, Bickersteth & Ballard, 1996). Sementara itu, penyebutan kawasan Asia Tenggara baru secara resmi digunakan di tengah Perang Dunia Kedua oleh Sekutu melalui pembentukan *South East Asia Command (SEAC)* pada tahun 1943 (Park, King, *et. al.*, 2013), namun melalui pengecualian terhadap Filipina dan sebagian besar Indonesia. Pada saat itu, SEAC juga memasukkan Ceylon, yang saat ini menjadi Sri Lanka, ke dalam pemetaan kawasan Asia Tenggara. Pada akhir dekade 1970-an, atau setelah proses penubuhan organisasi ASEAN yang terjadi pada dekade 1960-an, penggunaan istilah Asia Tenggara dan wilayah yang dicakupnya secara kasar telah muncul (Emerson, 1984). Penggunaan istilah Asia Tenggara pada masa itu sudah setara dengan definisi yang paling umum saat ini, yaitu wilayah regional Asia Tenggara dengan cakupan wilayah yang diwakili oleh negara-negara, baik yang berdaulat maupun wilayah dependen, seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos,

Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam (*United Nations Statistics Division*). Hanya saja, dari nama sebelas negara yang disebutkan sebagai negara-negara Asia Tenggara, hanya Timor Leste yang belum menjadi anggota ASEAN.

Terkait dengan keberadaan Timor Leste sebagai negara dan bangsa yang telah dianggap secara ilmiah menjadi bagian dari kawasan Asia Tenggara, ada pembandingan yang cukup diperhitungkan oleh peneliti, yaitu keberadaan Timor Leste yang telah menjadi negara anggota organisasi multilateral di dalam kawasan Asia Tenggara yang lain pada ruang lingkup *low politics* seperti *Southeast Asian Games Federation* pada tahun 2002 serta *ASEAN Football Federation* (Pemerintah Timor Leste). Selain itu, keberadaan Timor Leste sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bagi Timor Leste, sebenarnya negara dan bangsa ini juga mempunyai kedekatan dengan wilayah Oceania yang mempunyai ciri khas identitas Melanesia yang lebih menonjol. Hal ini pula yang menyebabkan Timor Leste sempat berada di persimpangan, yaitu tetap memutuskan untuk bergabung dengan ASEAN atau memutuskan untuk bergabung dengan organisasi multilateral lain seperti *Pacific Islands Forum* yang merupakan organisasi multilateral untuk kawasan Oceania seperti yang diminati oleh generasi-generasi prakemerdekaan dan terdidik Portugis yang lebih bercorak Melanesia (Sahin, 2014, Soares, 2021). Walaupun demikian, pada akhirnya, dengan memperhatikan berbagai keadaan, seperti keadaan realistik, keadaan struktural dan keadaan instrumental, Pemerintah Timor Leste memutuskan untuk memprioritaskan kebijakan multilateralnya kepada ASEAN sebelum benar-benar mengajukan diri ke dalam keanggotaan ASEAN secara resmi, pada tahun 2011 (Sahin, 2014). Seiring dengan kebijakan luar negeri Pemerintah Timor Leste terkait pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN, peneliti mencermati pula bahwa kemudian, muncul dukungan-dukungan terhadap kebijakan luar negeri yang mengarahkan Pemerintah Timor Leste untuk melakukan pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN bagi negara tersebut baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal, atau dari dalam negeri Timor Leste, banyak pendukung ASEAN di antara generasi-generasi Timor Leste yang lebih muda, khususnya

generasi terdidik Indonesia dan generasi muda pascakemerdekaan yang lebih dipengaruhi oleh globalisasi, dengan alasan karena ASEAN dianggap telah berevolusi menjadi lebih demokratis dengan memperkenalkan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) serta mekanisme-mekanisme hak asasi manusia (HAM) di dalamnya, yang dibuktikan dengan perubahan politik bertahap di Myanmar serta munculnya Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, mereka juga menganggap bahwa keanggotaan ASEAN diharapkan dapat meningkatkan hubungan diplomasi Indonesia dan Timor Leste (Soares, 2021). Dengan demikian, fenomena diplomatik ini juga telah menjadi pembeda di antara generasi-generasi pascakemerdekaan dan terdidik Indonesia dengan generasi-generasi prakemerdekaan atau terdidik Portugis seperti generasi dari seorang tokoh seperti Xanana Gusmão yang lebih memihak pada *Pasific Islands Forum* (Sahin, 2014, Soares, 2021).

Selanjutnya, secara eksternal, atau dari luar negeri Timor Leste, adanya dukungan diplomatis dari Indonesia (Soares, 2021), Kamboja (Hunt, 2021), dan Filipina (Buensuceso, 2021, Madijah, 2002), berdasarkan hubungan-hubungan diplomatis Timor Leste dengan negara-negara tersebut, dengan turut memperhatikan aspek sosiokultural serta aspek politis, khususnya berkaitan dengan situasi geopolitik dan politik internasional. Misalnya, Filipina mendukung Timor Leste secara politik untuk bergabung ke dalam ASEAN dengan alasan kesamaan sosio-kultural, yaitu sama-sama merupakan negara dengan masyarakat yang mayoritas beragama Kristen berdenominasi Katolik Roma (Madijah, 2002), terutama pada tahun pertama pengajuan keanggotaan (*admission*) dari Timor Leste, yaitu pada tahun 2011.

Peneliti berpendapat, pendapat-pendapat yang didapatkan dari hasil jajak pendapat atau survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga dapat menjadi bagian dari alasan signifikan untuk keanggotaan tetap dan penuh Timor Leste ke dalam ASEAN, dalam sudut pandang yang lebih demokratis. Riset yang dilakukan oleh ISEAS Yusof Ishak dari Singapura pada tanggal 14 November 2022 hingga tanggal 6 Januari 2023 menunjukkan bahwa 61,5% (enam puluh satu koma lima persen) dari jumlah responden mendukung penerimaan Timor Leste sebagai anggota tetap dan penuh ASEAN, sedangkan 15,8% (lima belas koma delapan

persen) lainnya menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap penerimaan Timor Leste sebagai anggota tetap dan penuh ASEAN, dan 22,7% (dua puluh dua koma tujuh persen) lainnya menyatakan ketidakyakinannya terhadap penerimaan Timor Leste sebagai anggota tetap dan penuh ASEAN. Survei tersebut dilakukan oleh ISEAS Yusof Ishak dari Singapura terhadap 1.308 responden (seribu tiga ratus delapan responden) dari sepuluh negara anggota ASEAN dengan Singapura yang mendominasi jumlah responden menurut kewarganegaraan yaitu 208 orang, atau 15,9% (lima belas koma sembilan persen) dari jumlah responden. Adapun, ada pula responden dari Thailand (dengan 144 orang, pada persentase sebesar 11 persen), Vietnam (dengan 136 orang, pada persentase sebesar 10,4 persen), Kamboja (pada persentase sebesar 10,2 persen), Malaysia (pada persentase sebesar 9,5 persen), Indonesia (pada persentase sebesar 9,3 persen), Brunei Darussalam (pada persentase sebesar 9,2 persen), Myanmar (pada persentase sebesar 8,8 persen), Republik Demokratik Rakyat Laos (pada persentase sebesar 8,2 persen), serta Filipina (pada persentase sebesar 7,6 persen) yang terlibat dalam kegiatan survei ini (ISEAS Yusof Ishak, 2023). Para responden yang terlibat dalam survei tersebut datang dari beragam latar belakang, seperti para akademisi dan peneliti (dengan persentase sebesar 34,8 persen), para pebisnis dan pelaku dunia keuangan (dengan persentase sebesar 24,7 persen), pegawai negeri (dengan persentase sebesar 17,7 persen), media dan kelompok masyarakat sipil (dengan persentase sebesar 18,3 persen), serta para responden yang terikat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang memiliki persentase sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari jumlah responden.

Akan tetapi, ada alasan signifikan yang lebih khusus dari keanggotaan Timor Leste ke dalam ASEAN. Peneliti menganggap alasan ini sebagai alasan yang lebih krusial dibandingkan alasan-alasan yang lain. Alasan signifikan tersebut adalah alasan ekonomis yang dibuktikan dengan adanya hubungan produktif dan konsumtif antara Timor Leste dengan negara-negara ASEAN, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial, beserta dengan rincian data yang cukup kuat untuk dapat disebutkan sebagai signifikansi terkait dengan pengajuan keanggotaan Timor Leste ke dalam ASEAN. Misalnya, pada sektor ekonomi Timor Leste, setidaknya untuk tahun 2020, menurut data perdagangan resmi Timor Leste, Indonesia

menguasai neraca impor Timor Leste yaitu sebesar 35,6% (tiga puluh lima koma enam persen) dari semua barang impor yang masuk ke Timor Leste (Pemerintah Timor Leste, Narasi.tv, 1 Agustus 2022), serta fenomena surplus yang cukup besar pada neraca ekspor-impor Provinsi Nusa Tenggara Timur bulan April 2022 yaitu sebesar US\$13.239.306 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam dolar) dalam Dolar Amerika Serikat. Dalam temuan yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, peneliti turut mencermati bahwa dalam data komoditas ekspor dari Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, tercatat bahwa komoditas-komoditas ekspor dari provinsi ini semuanya dikirim ke Timor Leste. Selanjutnya, untuk memahami data-data yang terkait dengan neraca ekspor-impor Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lebih rinci, yang juga turut terkait dengan neraca ekspor-impor nasional Timor Leste, peneliti juga menyajikan infografisnya, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1 Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan April 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (April 2022)

Terlepas dari berbagai alasan signifikan yang bersifat empiris tersebut, keanggotaan tetap dan penuh ASEAN bagi Timor Leste, bagi peneliti, juga mempunyai dampak yang cukup besar bagi kestabilan ekonomi yang berujung pada kestabilan politik domestik negara tersebut, setidaknya mencermati Timor Leste di dekade pertamanya sebagai sebuah negara-bangsa (*nations-states*) yang berdaulat, bertepatan ketika keanggotaan Timor Leste baru saja diresmikan di dalam *ASEAN Regional Forum* pada tahun 2005, serta keikutsertaan Pemerintah Timor Leste sebagai *signatory* dalam sebuah perjanjian yang disebut sebagai *Treaty of Amity and Cooperation*, pada bulan Januari 2007 (Tobing, 2019), beberapa tahun sebelum pengajuan resmi Pemerintah Timor Leste terhadap akses mereka di dalam ASEAN sebagai anggota yang tetap dan penuh untuk pertama kali pada tahun 2011 (Wahyono, 2019).

Sebenarnya, ada berbagai potensi manfaat yang akan didapatkan oleh negara dan bangsa Timor Leste setelah menjadi anggota tetap dan penuh ASEAN. Beberapa manfaat tersebut, juga semakin terasa jika menyertakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area*) di dalamnya. Memang, seringkali ASEAN dianggap hanya sebagai sebuah organisasi multilateral yang mengurus kerja sama-kerja sama di kawasan Asia Tenggara yang bersifat ekonomi, walaupun sebenarnya ASEAN bekerja melampaui ranah perekonomian (Kurus, 1993). Pertama, negara Timor Leste akan lebih terjamin keberadaannya di dalam kawasan Asia Tenggara serta akan mendapatkan jaminan lebih baik untuk terbebas dari gerakan-gerakan yang melakukan intervensi terhadap urusan-urusan dalam negeri Timor Leste berdasarkan kesepakatan di dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara) yang telah ditandatangani di bawah struktur ASEAN pada tanggal 24 Februari 1976, serta telah menerima amandemen untuk pertama kalinya pada tanggal 15-16 Desember 1987, amandemen untuk yang kedua kalinya pada tanggal 25 Juli 1998 (ASEAN, 1976, Pemerintah Indonesia, 1999), dan amandemen untuk yang ketiga kalinya pada tahun 2010, juga di bawah struktur ASEAN (ASEAN). Kedua, masyarakat Timor Leste akan terintegrasi secara ekonomi dengan masyarakat sepuluh negara anggota lainnya, termasuk Indonesia yang menjadi mitra utama

ekspor dan impor Timor Leste. Mencermati pula bahwa sesungguhnya para anggota ASEAN juga telah menandatangani sebuah perjanjian perdagangan bebas dengan Australia, Tiongkok, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* pada bulan November 2020, serta telah membangun kawasan perdagangan bebas lain dengan India melalui perjanjian sejenis (ASEAN, *Council on Foreign Relations*, 2022), serta kecenderungan struktur ekonomi Indonesia yang turut menyertakan penanaman modal asing dengan negara-negara bersangkutan (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia), maka akan ada kesempatan bagi Timor Leste untuk mendapatkan kemudahan dalam meraih penanaman modal asing selain dari Indonesia maupun mitra-mitra lainnya di dalam wilayah negaranya di masa depan. Dengan mempertimbangkan berbagai manfaat tersebut, sangat terlihat jika hal-hal tersebut dapat menjadi solusi bagi tantangan di dalam negara Timor Leste itu sendiri, sehingga wajar jika manfaat-manfaat sebagai anggota ASEAN yang tetap dan penuh tersebut, juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan proses pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN untuk negara Timor Leste, juga menjadi kepentingan nasional Timor Leste.

Mengingat bahwa proses pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN untuk Timor Leste merupakan kepentingan nasional negara ini, maka ini juga turut menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Timor Leste. Secara umum, kebijakan luar negeri Pemerintah Timor Leste sangat menekankan pada semangat untuk menjamin kelangsungan hidup serta menegaskan kemerdekaan politik negara dan masyarakat mereka (Strating, 2019). Keanggotaan dalam organisasi internasional dan regional merupakan salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri Pemerintah Timor Leste (Strating, 2019). Dalam sudut pandang peneliti, ini bisa diartikan sebagai pandangan bahwa Pemerintah Timor Leste sangat menekankan regionalisme dan multilateralisme di dalam politik luar negerinya, sehingga peneliti menilai bahwa cukup wajar apabila Timor Leste sempat memerlukan waktu yang lebih banyak dalam keputusan untuk tetap bergabung dengan ASEAN, dengan dukungan dari generasi-generasi Timor Leste yang lebih muda, khususnya generasi terdidik Indonesia dan generasi muda pascakemerdekaan yang lebih dipengaruhi oleh globalisasi, atau bergabung dengan organisasi multilateral lain seperti *Pacific*

Islands Forum yang merupakan organisasi multilateral untuk kawasan Oceania seperti yang diminati oleh generasi-generasi prakemerdekaan dan terdidik Portugis, dengan memprioritaskan corak sosiokultural Melanesia yang juga dimiliki oleh masyarakat Timor Leste secara umum (Sahin, 2014, Soares, 2021).

Savin (2014), di dalam artikel ilmiahnya, juga telah melaporkan alasan-alasan krusial mengenai kebijakan luar negeri Timor Leste terkait dengan regionalisme dan multilateralisme, seperti adanya usaha untuk mengkonsolidasi identitas politik dan kebudayaan negara tersebut, untuk menguatkan kedaulatan Timor Leste sebagai negara serta mencerminkan proses transisi yang lebih luas yang tertanam dalam transformasi negara dan bangsa di bawah pengawasan internasional. Hasil penelitian Savin (2014) tersebut, diduga kuat oleh peneliti menjadi suatu pertanda bahwa kemungkinan besar hingga saat ini, secara resmi, sebelum Presiden José Ramos-Horta, pada tahun 2022, menyatakan deklarasi, Pemerintah Timor Leste masih memperjuangkan keanggotaan Timor Leste ke dalam ASEAN, setidaknya sejak dua tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020. Hal ini juga turut diperkuat dengan laporan ASEAN sendiri, serta hasil penelitian Hägerdal & Berlie (2017), yang menyatakan bahwa Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah Indonesia terlihat masih membahas hal-hal terkait akses tetap dan penuh Timor Leste ke dalam ASEAN, dengan estimasi tahun bergabung saat itu adalah tahun 2018.

Hingga memasuki dekade terbaru, yaitu pada dekade tahun 2020-an, ketika tulisan ilmiah ini mulai disusun untuk pertama kali, Timor Leste tetap belum diterima menjadi anggota tetap dan penuh ASEAN, serta terlihat hanya berstatus sebagai *observer member* sejak awal pengakuannya oleh ASEAN pada tahun 2002 ketika negara tersebut baru pertama kali merdeka, seperti yang telah dijelaskan oleh José Manuel Ramos-Horta yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Timor Leste (AFP, 2006), walaupun status tersebut kemudian baru benar-benar terlihat dideklarasikan oleh organisasi ASEAN saat Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-40 (keempat puluh) dan ke-41 (keempat puluh satu) di Phnom Penh, Kamboja. Ada berbagai alasan mengapa itu bisa terjadi, seperti adanya penolakan dari Singapura dan Republik Demokratik Rakyat Laos dengan alasan bahwa Timor Leste belum cukup berkembang untuk bergabung serta adanya masalah kualitas sumber daya manusia (Padden, 2011, Tobing, 2019, Soares, 2021,

Yahuti, 2022). Walaupun sebenarnya, di sisi lain, masing-masing anggota ASEAN, di dalam kebijakan luar negerinya, telah memutuskan untuk bersikap menerima pengajuan keanggotaan ASEAN dari Timor Leste secara unilateral, sehingga sesungguhnya, landasan instrumental yang berdasarkan kepada Piagam ASEAN, sudah mulai dipenuhi satu per satu oleh Pemerintah Timor Leste.

Pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-40 (keempat puluh) dan ke-41 (keempat puluh satu) di Phnom Penh, Kamboja, secara konsensus, sepuluh negara anggota tetap dan penuh ASEAN yang ada, menyatakan secara prinsip (*in-principal admission*), bahwa Timor Leste adalah anggota ke-11 (kesebelas) ASEAN, serta menyatakan dukungan secara penuh untuk persiapan Timor Leste menuju keanggotaan tetap dan penuhnya di dalam ASEAN, seperti pemberian *observer status* serta izin untuk partisipasi di dalam semua pertemuan ASEAN termasuk di dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN (*ASEAN Summit*) yang akan diselenggarakan selanjutnya, setelah tahun 2022 (ASEAN, 11 November 2022). Narasumber dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia turut menyatakan bahwa konsekuensi lain dari penerimaan Timor Leste secara prinsip (*in-principal admission*) di dalam ASEAN adalah Pemerintah Timor Leste berhak menerima bantuan dari negara-negara anggota ASEAN yang lain untuk mempersiapkan keanggotaan tetap dan penuhnya setelah menerima keanggotaan secara prinsip di dalam ASEAN.

Selanjutnya, Timor Leste juga menerima bantuan dari organisasi ASEAN terkait dengan peta jalan resmi yang berbasis kriteria yang objektif untuk keanggotaan penuh Timor Leste berdasarkan tonggak yang diidentifikasi dalam laporan Misi Pencari Fakta (*the Fact-Finding Missions*) yang dilakukan oleh tiga pilar Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) serta rumusan peta jalan yang disusun oleh Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) beserta dengan laporan-laporan terkait yang diadopsi kemudian ke dalam KTT ASEAN ke-42 (ASEAN, 11 November 2022). Dalam surat pernyataan dari para pemimpin negara-negara ASEAN terkait yang dikeluarkan pada pertemuan tersebut juga, sepuluh negara anggota tetap dan penuh ASEAN juga diamanatkan untuk sepenuhnya mendukung Timor Leste untuk mencapai tonggak sejarah melalui penyediaan bantuan pengembangan kapasitas dan dukungan lain yang diperlukan dan relevan untuk

keanggotaan penuhnya di ASEAN, terutama secara bilateral melalui hubungan *government-to-government* atau hubungan antar pemerintah (Divisi Institusi Publik dan Pemerintahan Digital, Departemen Urusan-Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2012) di antara Timor Leste terhadap negara-negara tersebut. Walaupun demikian, Timor Leste memang tetap belum bergabung sebagai anggota tetap dan penuh ASEAN pada Pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-40 (keempat puluh) dan ke-41 (keempat puluh satu) di Phnom Penh, Kamboja. Secara garis besar, itu beralasan terkait dengan masalah mengenai kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara Timor Leste merupakan hal yang berhubungan dengan terhadap kapabilitas negara Timor Leste terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*), serta Masyarakat Sosio-Kultural ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*), yang merupakan tiga pilar ASEAN, berdasarkan penyampaian narasumber yang berasal dari Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Buensuceso (2021) juga mengungkapkan bahwa konsistensi kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasi nasional Timor Leste dengan ASEAN, juga diperhitungkan.

Berdasarkan eksplanasi di dalam latar belakang masalah ini, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk mengetahui secara terkini dan menjelaskannya secara ilmiah mengenai proses diplomasi Timor Leste untuk mencapai keanggotaan ASEAN-nya, terutama selama tahun 2018 hingga tahun 2022, mengingat Pemerintah Timor Leste pada rentang waktu tersebut diyakini masih mempunyai kebijakan luar negeri terkait dengan pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN bagi negara ini. Di sisi lain, dengan mempertimbangkan berbagai informasi yang beredar, terlihat pula bahwa ASEAN masih memberi kesempatan kepada Pemerintah Timor Leste untuk mengajukan keanggotaan tetap dan penuh bagi negara ini selama tahun 2018 sampai tahun 2022, menurut informasi-informasi yang valid beserta dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang bersifat ilmiah. Dengan demikian, maka peneliti mengajukan judul penelitian yaitu Diplomasi Timor Leste untuk Keanggotaan Tetap dan Penuh ASEAN Selama Tahun 2018 hingga Tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang tepat untuk mengkaji permasalahan ini adalah bagaimana diplomasi Timor Leste untuk pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN selama tahun 2018 hingga tahun 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian ini dengan tujuan penelitian untuk mengetahui seluruh proses pengajuan keanggotaan Timor Leste ke dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan akan adanya manfaat-manfaat penelitian, yang terdiri atas manfaat akademis dan manfaat praktis.

Manfaat akademis dari penelitian ini, yaitu dapat memberikan informasi ilmiah yang terkini terkait dengan proses pengajuan keanggotaan Timor Leste ke dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) beserta dengan fenomena-fenomena internasional yang identik.

Manfaat praktis yaitu dapat memberikan informasi terbaru mengenai proses pengajuan keanggotaan Timor Leste ke dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), serta memberikan contoh kasus kepada fenomena-fenomena hubungan internasional yang identik.

1.5 Sistematika Penulisan

Selanjutnya, peneliti telah menyusun penulisan untuk penelitian ini menurut sistematika-sistematika penulisan yang memenuhi kaidah akademis, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama, peneliti membahas latar belakang permasalahan beserta dengan perumusan masalahnya, yang kemudian akan menjadi pertanyaan-

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, peneliti akan menjelaskan mengenai konsep dan teori sesuai dengan topik yang diambil, untuk mempersiapkan hipotesis-hipotesis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dihasilkan dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, peneliti juga akan mempersiapkan kerangka pemikiran sebagai penggambaran umum dari permasalahan yang diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga, peneliti akan menjelaskan mengenai objek penelitian, beserta dengan teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu penelitian yang terkait.

BAB IV: GAMBARAN UMUM DIPLOMASI PENGAJUAN KEANGGOTAAN TETAP DAN PENUH TIMOR LESTE KE ASEAN

Pada bab keempat, peneliti akan memaparkan gambaran umum dari objek penelitian, yaitu diplomasi antara Timor Leste untuk pengajuan keanggotaan tetap dan penuh ASEAN sebelum tahun 2018 hingga tahun 2022.

BAB V: DIPLOMASI TIMOR LESTE UNTUK PENGAJUAN KEANGGOTAAN TETAP DAN PENUH *ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS* (ASEAN) (2018-2022)

Pada bab kelima, peneliti akan mendeskripsikan diplomasi Timor Leste dalam proses pengajuan keanggotaan tetap dan penuh *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) untuk negaranya, selama tahun 2018 hingga tahun 2022.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab keenam ini, sekaligus merupakan bab terakhir di dalam penelitian ini, peneliti telah membuat kesimpulan mengenai diplomasi Timor Leste selama

tahun 2018 hingga tahun 2022 dalam proses pengajuan keanggotaan tetap dan penuh *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) untuk negaranya.